

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kebijakan Pendidikan

1. Pengertian Kebijakan

Secara etimologis, istilah kebijakan berasal dari kata bahasa Inggris *policy*, yang berakar dari bahasa Yunani yakni *polis* yang berarti kota atau negara-kota. Dari asal-usul tersebut, kebijakan dapat dimaknai sebagai serangkaian keputusan atau tindakan yang digunakan untuk mengelola berbagai persoalan serta kepentingan yang berkaitan dengan masyarakat luas.¹¹ Menurut Koontz dan O'Donnell, kebijakan yaitu pedoman umum yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dengan memperhatikan batasan-batasan tertentu.¹² Kebijakan dapat dimaknai sebagai rangkaian keputusan atau tindakan yang dihasilkan interaksi yang terorganisasi dalam upaya mengenali dan menyelesaikan persoalan yang dipandang sebagai isu publik dan memiliki dimensi politik.¹³

Poerwadarminta mengartikan kebijakan sebagai wujud kecakapan atau kebijaksanaan yang bersumber dari sifat bijak, yaitu kemampuan menggunakan akal pikiran dan pertimbangan

¹¹ H.M. Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan: Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015). hlm 37.

¹² Sagala Syaiful, *Administrasi Pendidikan Kontemporer*. (Bandung: Alfabeta, 2008). hlm 97.

¹³ Abdullah Ramdhani dan Muhammad Ali Ramdhani, "Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik," *Jurnal Publik*, Vol.11, No.1, 2017. hlm 2.

secara cerdas dalam mengambil keputusan atau tindakan.¹⁴ Selain itu, Kebijakan dapat diartikan sebagai sikap atau keputusan yang dirumuskan untuk mengatasi permasalahan guna mencapai sebuah tujuan yang diinginkan.¹⁵ Sedangkan menurut Duke dan Canady, memberikan makna kebijakan, bahwa kebijakan merupakan pernyataan tujuan yang diwujudkan melalui serangkaian keputusan sebuah lembaga untuk dapat mengatur, mengarahkan, serta juga memengaruhi lingkungan kewenangannya. Kebijakan berfungsi sebagai strategi pemecahan masalah serta hasil dari proses pengambilan keputusan yakni yang mendukung pelaksanaan dan pencapaian sebuah tujuan yang telah ditetapkan.¹⁶

Berdasarkan berbagai pengertian yang telah dikemukakan, kebijakan dapat dipahami yakni sebagai seperangkat prinsip atau gagasan yang lahir dari suatu keputusan pihak yang memiliki kewenangan dalam menangani suatu permasalahan. Kebijakan tersebut kemudian menjadi acuan dalam pelaksanaan tindakan di masa mendatang untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

2. Pengertian Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan adalah terjemahan dari suatu istilah *educational policy* yang tersusun atas dua konsep utama, yaitu kebijakan dan juga pendidikan. Kebijakan mengandung makna

¹⁴ H.A. Rusdiana, *Kebijakan Pendidikan: Dari Filosofi Ke Implementasi*. (Bandung: CV, Pustaka Setia). hlm 31.

¹⁵ Nanang Fattah, *Analisis Kebijakan Pendidikan*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013). hlm 135.

¹⁶ Iwan Heriawan, "Kebijakan Pendidikan Provinsi (STA dan SMK) dan Analisis SWOT di Kalimantan Timur," *Jurnal Pendas Mahakam*, Vol.3, No.2, Agustus 2018. hlm 100.

pedoman atau aturan yang digunakan tersebut sebagai dasar dalam bertindak, sedangkan pendidikan menunjukkan bidang atau ruang lingkup yang menjadi sasaran dari kebijakan tersebut.

Menurut H.A.R. Tilaar dan juga Rian Nugroho, kebijakan pendidikan yaitu sebuah proses dan hasil perumusan strategi yang berlandaskan visi misi pendidikan dan untuk mencapai tujuan pendidikan dalam kurun waktu tertentu.¹⁷ Kebijakan pendidikan juga dimaknai sebagai ketentuan yang mengatur penyelenggaraan pendidikan, mulai dari penetapan tujuan, pelaksanaan, evaluasi, hingga tindak lanjutnya. Kebijakan tersebut bertujuan menciptakan keteraturan serta mencegah konflik dalam pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat di bidang pendidikan.¹⁸

Dengan demikian, kebijakan pendidikan bisa disimpulkan sebagai suatu pedoman tindakan yakni yang berasal dari sebuah perumusan langkah-langkah strategis di dalam pendidikan, yang diambil sebagai respons terhadap permasalahan pendidikan untuk mencapai tujuan tertentu pada kurun waktu yang telah ditetapkan.

3. Metode Analisis Kebijakan Pendidikan

Menurut William N. Dunn dalam bukunya yang dirangkum oleh Nanang Fattah dalam Analisis Kebijakan Pendidikan, terdapat lima prosedur utama dalam analisis kebijakan pendidikan, yaitu: 1) perumusan masalah (penyusunan agenda), 2) proyeksi (formulasi

¹⁷ Abd. Majid, *Analisis Kebijakan Pendidikan*. (Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI), 2018). hlm 10.

¹⁸ Arwildayanto, dkk., *Analisis Kebijakan Pendidikan: Kajian Teoritik, Eksploratif, dan Aplikatif*. (Bandung: CV Cendekia Press, 2018). hlm 12.

kebijakan), 3) rekomendasi (adopsi kebijakan), 4) pemantauan (implementasi kebijakan), dan 5) evaluasi (penilaian kebijakan).¹⁹

a. Perumusan Masalah

Proses perumusan masalah yakni dilakukan untuk mengenali dan memahami suatu permasalahan secara menyeluruh serta mengaitkannya dengan pengetahuan yang relevan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan, yang kemudian akan digunakan untuk menyusun agenda (agenda setting). Tahap ini membantu dalam mengungkap asumsi-asumsi yang tersembunyi, menganalisis penyebab masalah, menentukan tujuan yang mungkin dicapai, menyatukan pandangan yang berbeda, dan merancang kebijakan baru.²⁰

William Dunn, menjelaskan bahwa perumusan masalah terdiri dari empat tahap, yaitu: identifikasi masalah (*problem search*), penetapan definisi masalah (*problem definition*), perincian atau spesifikasi masalah (*problem specification*), dan pengenalan atau pemahaman terhadap masalah (*problem sensing*).²¹

Pencarian masalah adalah langkah awal yang di mana pembuat kebijakan mulai menyusun kebijakan. Pada tahap ini, analisis kebijakan akan menghadapi meta-masalah dan membedakan antara masalah yang bersifat publik dan privat.

¹⁹ Nanang Fattah, *Analisis Kebijakan Pendidikan*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013). hlm 8

²⁰ Ibid.

²¹ Sahya Anggara, *Kebijakan Publik*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014). hlm 28.

Selanjutnya, dalam tahap pendefinisian masalah, analisis kebijakan mengubah meta masalah menjadi masalah-masalah yang substantif, yaitu mengkategorikan masalah lebih mendasar dan umum.

Tahap berikutnya adalah spesifikasi masalah, di mana masalah substantif diubah menjadi masalah yang lebih formal dan terstruktur.

Tahap terakhir adalah identifikasi masalah, yaitu proses ketika analisis kebijakan mengamati dan menganalisis berbagai kondisi yang menjadi penyebab munculnya suatu permasalahan, sehingga masalah tersebut dapat dirumuskan dan dijelaskan secara lebih jelas serta tepat.

b. Proyeksi

Proyeksi merupakan proses untuk memperkirakan berbagai sebuah kemungkinan yang dapat terjadi di masa depan serta menilai dampak dari kebijakan yang sedang atau akan diterapkan. Melalui proyeksi, dapat diidentifikasi alternatif kebijakan yang realistis, potensi hambatan yang mungkin muncul, serta tingkat kelayakan kebijakan dalam mencapai tujuan yang diharapkan.²²

Proyeksi tersebut memberikan informasi tentang potensi masalah yang bisa terjadi di masa depan akibat dari kebijakan yang diambil, termasuk jika tidak ada tindakan

²² Nanang Fattah, *Analisis Kebijakan Pendidikan*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013). hlm 8

yang dilakukan sama sekali. Prosedur ini dilakukan dalam sebuah tahap formulasi kebijakan.²³

Dengan demikian, proses proyeksi menuntut analisis kebijakan untuk memperkirakan berbagai kemungkinan perkembangan yang berkaitan dengan suatu permasalahan serta merumuskan alternatif solusi yang dinilai efektif untuk mengatasinya pada masa yang akan datang.

c. Rekomendasi

Tahap rekomendasi ini bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai manfaat dan nilai dari berbagai alternatif kebijakan yang bisa dipilih sebagai solusi atas permasalahan di masa depan.²⁴ Proses ini mendukung pengambil keputusan dalam menetapkan dan mengadopsi kebijakan yang paling tepat. Selain itu, rekomendasi berperan dalam menilai tingkat risiko dan ketidakpastian, mengidentifikasi berbagai dampak yang mungkin timbul, menetapkan kriteria pemilihan alternatif kebijakan, serta menentukan tanggung jawab administratif dalam pelaksanaannya.²⁵

d. Pemantauan

Pemantauan atau monitoring adalah proses yang menghasilkan informasi tentang dampak kebijakan yang telah diterapkan. Tahap ini mendukung pengambil kebijakan

²³ Nanang Fattah, *Analisis Kebijakan Pendidikan*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013). hlm 8

²⁴ Ibid. hlm 55.

²⁵ Ibid. hlm 9.

dalam implementasi kebijakan dengan memberikan data mengenai hasil dan pengaruh kebijakan. Pemantauan berfungsi untuk mengevaluasi dalam tingkat kepatuhan, mengidentifikasi dampak yang tidak diinginkan, menemukan kendala dalam pelaksanaan kebijakan, serta menentukan tanggung jawab pada pihak-pihak terkait di setiap tahap kebijakan.²⁶

Proses pemantauan dilakukan melalui pengumpulan data secara berkelanjutan, yang menghasilkan indikator untuk menilai perkembangan dan pencapaian kebijakan. Informasi yang diperoleh berguna untuk mengevaluasi sejauh mana program atau kebijakan berjalan yakni dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selain hal itu, indikator tersebut memberikan masukan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik, termasuk perbaikan kebijakan yang sedang berlangsung dan pembelajaran untuk program serupa.

e. Penilaian/Evaluasi

Penilaian atau evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana hasil pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Tahap ini menghasilkan informasi yang penting untuk pertimbangan dalam menilai efektivitas kebijakan serta mendukung proses pengambilan keputusan dan perbaikan kebijakan di masa mendatang.²⁷

²⁶ Nanang Fattah, *Analisis Kebijakan Pendidikan*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013). hlm 9

²⁷ Ibid.

Evaluasi tidak hanya menilai keberhasilan kebijakan dalam menyelesaikan masalah, juga memberikan kritik dan saran terkait nilai-nilai yang menjadi dasar kebijakan. Selain itu, evaluasi juga membantu dalam penyesuaian sehingga kebijakan dapat diperbaiki di masa mendatang.²⁸

4. Tahapan Kebijakan Pendidikan

William Dunn, menyatakan bahwa sebuah kebijakan adalah serangkaian keputusan serta tindakan yang terdiri dari beberapa tahapan yakni, sebagai berikut:²⁹

a. Tahap Penyusunan Agenda

Pada tahap ini, suatu permasalahan dimasukkan ke dalam agenda kebijakan setelah melalui pertimbangan tertentu, seperti tingkat dampaknya terhadap masyarakat serta kebutuhan untuk segera menanganinya.

b. Tahap Formulasi Kebijakan

Tahap ini yakni melibatkan perumusan usulan atau alternatif kebijakan oleh para analis kebijakan yang di mana untuk memformulasikan sebuah kebijakan untuk dijalankan sesuai dengan formulasi kebijakan yang dibuat.

c. Tahap Adopsi Kebijakan

Pada tahap ini, alternatif kebijakan yang dianggap paling sesuai dipilih dan ditetapkan melalui persetujuan serta

²⁸ Ibid.

²⁹ William Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kedua, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003).

dukungan mayoritas pihak yang terlibat dalam proses perumusan sebuah kebijakan.

d. Tahap Implementasi Kebijakan

Tahap ini merupakan pelaksanaan kebijakan yang telah dipilih dan disetujui, dilakukan oleh lembaga-lembaga administratif yang bertanggung jawab.

e. Tahap Penilaian/Evaluasi Kebijakan

Evaluasi sebuah kebijakan meliputi analisis terhadap isi kebijakan, pelaksanaannya, dan dampaknya. Tahap ini bertujuan untuk mengevaluasi hasil dari kebijakan, menilai keefektifan program dalam mengatasi permasalahan, serta memberikan masukan untuk perbaikan kebijakan.

Kinerja suatu kebijakan dapat dinilai yakni melalui beberapa kriteria utama. Efektivitas menunjukkan tingkat keberhasilan kebijakan dalam mencapai tujuan. Efisiensi berkaitan dengan perbandingan antara hasil diperoleh dan sumber daya yang digunakan. Kecukupan menilai sejauh mana kebijakan bisa memenuhi kebutuhan. Pemerataan berfokus pada distribusi manfaat kebijakan. Selain itu, responsivitas mengukur kemampuan kebijakan dalam menanggapi kebutuhan dan harapan masyarakat, sedangkan ketepatan menilai kesesuaian tujuan kebijakan dengan nilai, kondisi, dan asumsi yang menjadi dasar pembentukannya.³⁰

³⁰ Ibid.

B. Implementasi Kebijakan

1. Pengertian Implementasi Kebijakan Pendidikan

Secara etimologis, istilah implementasi berasal dari kata kerja *to implement* yang dalam Kamus Webster diartikan sebagai *to provide the means for carrying out*, yaitu mengadakan sarana atau langkah yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan.³¹ Implementasi merupakan proses pelaksanaan dari suatu rencana yang telah dirancang sebelumnya sebagai langkah untuk merealisasikan arah tujuan yang telah ditetapkan. Dalam bidang pendidikan, implementasi kebijakan dalam pendidikan ini dapat dipahami sebagai serangkaian upaya untuk menerapkan ketentuan dan keputusan kebijakan pendidikan ke dalam praktik nyata sehingga tujuan pendidikan yang diharapkan dapat tercapai.³²

Implementasi kebijakan yakni bagian penting dalam siklus kebijakan yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan. Menurut Hasbullah, proses kebijakan berlangsung melalui beberapa tahapan yaitu mulai dari penyusunan agenda, perumusan dan pengesahan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, hingga tahap evaluasi untuk menilai efektivitas kebijakan tersebut. Keseluruhan tahapan tersebut menunjukkan adanya proses yang sistematis dan berurutan dalam menghasilkan serta menjalankan suatu kebijakan.³³

³¹ Mujiyanto Solichin, "Implementasi Kebijakan Pendidikan dan Peran Birokrasi," *Religi: Jurnal Studi Islam*, Vol.6, No.2, Oktober, 2015. hlm 154.

³² Arwildayanto, dkk., *Analisis Kebijakan Pendidikan: Kajian Teoritik, Eksploratif, dan Aplikatif* (Bandung: CV Cendekia Press, 2018). hlm 73.

³³ Elih Yuliah, "Implementasi Kebijakan Pendidikan (The Implementation of Educational Policies)," *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, Vol.3, No.2, 2020. hlm 130.

Dunn, juga menjelaskan yakni bahwa implementasi sebuah kebijakan adalah fase dalam proses praktik kebijakan yang sudah dibuat agar terealisasi dalam sebuah kegiatan. Menurut Dunn, implementasi ini merupakan salah satu tahapan dalam siklus kebijakan publik. Tahap awal dimulai dengan penyusunan agenda, yaitu proses ketika suatu permasalahan mendapat perhatian dan masuk ke dalam agenda publik. Selanjutnya adalah formulasi kebijakan, yang berfokus pada penyusunan berbagai alternatif solusi untuk mengatasi masalah yang ada. Tahap berikutnya adalah adopsi kebijakan, yaitu penetapan pilihan kebijakan yang dianggap paling tepat melalui mekanisme pengambilan keputusan. Setelah itu, kebijakan yang telah disahkan dilaksanakan oleh lembaga atau unit terkait dengan dukungan sumber daya yang tersedia. Tahap terakhir adalah evaluasi, yang bertujuan untuk menilai kesesuaian pelaksanaan kebijakan dengan ketentuan yang berlaku serta mengukur tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.³⁴

Implementasi kebijakan di dalam sebuah pendidikan dapat juga diartikan sebagai suatu proses pelaksanaan kebijakan yang dirancang untuk menyelesaikan permasalahan di bidang pendidikan. Proses ini bertujuan menghasilkan dampak atau hasil (*outcome*) yakni yang mendukung tercapainya tujuan kebijakan pendidikan.³⁵

³⁴ Ibid.

³⁵ Arwildayanto, dkk., *Analisis Kebijakan Pendidikan: Kajian Teoritik, Eksploratif, dan Aplikatif*. (Bandung: CV Cendekia Press, 2018). hlm 74.

Secara umum, implementasi kebijakan adalah tahap keempat setelah penyusunan agenda, formulasi kebijakan, dan adopsi kebijakan. Setelah implementasi, tahap berikutnya adalah pemantauan dan evaluasi. Namun, urutan dan isi tahap dalam proses kebijakan bersifat fleksibel, karena dapat berbeda-beda tergantung pada teori dan perspektif yang digunakan, serta situasi dan kondisi tertentu, seperti jenis kebijakan, lingkungan kebijakan, dan stratifikasi kebijakan.³⁶

Berdasarkan uraian tersebut, implementasi kebijakan pendidikan dipahami sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh suatu lembaga untuk menerapkan kebijakan pendidikan yang telah dirumuskan ke dalam kegiatan nyata, sehingga capaian yang telah ditetapkan dapat diwujudkan secara efektif.

2. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Keberhasilan kebijakan sangat dipengaruhi oleh adanya beberapa faktor, antara lain:

a. Faktor Rumusan Kebijakan

Faktor ini berhubungan dengan mutu perumusan kebijakan yang telah disusun, mencakup kejelasan isi kebijakan, ketepatan dalam menetapkan sasaran, kemudahan untuk dipahami dan ditafsirkan, serta kemudahan dalam penerapannya selama proses dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan berlangsung.

³⁶ Elih Yuliah, "Implementasi Kebijakan Pendidikan (The Implementation of Educational Policies)," *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, Vol.3, No.2, 2020. hlm 131.

b. Faktor Personel Pelaksana

Faktor ini mencakup berbagai karakteristik individu yang berperan dalam melaksanakan kebijakan, seperti tingkat pada pendidikan, riwayat kerja, motivasi, komitmen, kinerja, dan kemampuan berkolaborasi dengan pihak lain. Selain itu, latar belakang budaya, bahasa, dan pandangan ideologis para pelaksana juga dapat memengaruhi cara mereka menerapkan kebijakan. Keseluruhan aspek tersebut berkontribusi terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

c. Faktor Sistem Organisasi

Pelaksana pada faktor sistem organisasi mencakup sistem organisasi yang bertugas melaksanakan kebijakan. Hal-hal yang perlu diperhatikan meliputi jaringan kerja organisasi, hierarki kewenangan, model pembagian tugas, gaya kepemimpinan, aturan kerja, target yang ditetapkan untuk setiap tahap pelaksanaan, serta metode monitoring dan evaluasi yang digunakan.³⁷

Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, implementasi kebijakan pendidikan yakni diharapkan dapat berjalan efektif dan menghasilkan pengaruh atau keluaran yang sesuai dengan tujuan yang pastinya telah ditetapkan. Diharapkan program tersebut dapat berkembang untuk ke depannya, dan bisa meningkatkan mutu pendidikan.

³⁷ H. A. Rusdiana, *Kebijakan Pendidikan: Dari Filosofi Ke Implementasi*. (Bandung: CV, Pustaka Setia). hlm 138-139.

C. Program Kelas Unggulan

1. Pengertian Program

Program dapat diartikan sebagai runtunan kegiatan disusun sebagai bentuk pelaksanaan pada suatu kebijakan. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam kurun waktu yang relatif lama, berlangsung secara berkesinambungan, serta dijalankan dalam suatu organisasi dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait.³⁸

Menurut Muhaimin, suatu program adalah pernyataan yang merangkum berbagai harapan dan tujuan yang saling berhubungan untuk mencapai sebuah target tertentu. Sebuah program biasanya mencakup seluruh kegiatan dalam satu unit administrasi yang saling berkaitan, di mana pelaksanaannya harus dilakukan secara bersamaan atau bertahap.³⁹

Menurut Joan, program merupakan segala bentuk rencana atau usaha yang dirancang untuk mencapai hasil atau dampak tertentu. Program dapat berbentuk sesuatu yang bersifat nyata, seperti kurikulum, maupun yang bersifat konseptual atau tidak berwujud secara fisik, seperti prosedur dan tata cara pelaksanaan.⁴⁰ Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa program kelas unggulan adalah rangkaian kegiatan yang diterapkan dengan tujuan menghasilkan dampak atau hasil yang diinginkan.

³⁸ Rusydi Ananda dan Tien Rafida, *"Pengantar Evaluasi Program Pendidikan,"* (Medan: Perdana Publishing, 2017). hlm 5.

³⁹ Mubarat Husni, dkk., *"Implementasi Program Pendidikan Akselerasi dan Unggulan di Perguruan Al-Azhar Medan,"* *Jurnal Edu Religia*, Vol.3, No.1, Januari-Maret 2019. hlm 4.

⁴⁰ Rusydi Ananda dan Tien Rafida, *"Pengantar Evaluasi Program Pendidikan,"* (Medan: Perdana Publishing, 2017). hlm 5.

2. Pengertian Kelas Unggulan

Menurut Direktorat Pendidikan Dasar, program kelas unggulan yaitu kelas khusus untuk peserta didik dengan prestasi dan kemampuan unggul. Peserta didik dalam kelas ini memperoleh layanan pembelajaran yang disesuaikan melalui pengembangan kurikulum serta pengayaan materi tertentu untuk mendukung pengembangan potensi mereka secara optimal.⁴¹ Kelas unggulan merupakan program pembelajaran khusus yang diperuntukkan bagi peserta didik dengan bakat, kreativitas, dan kemampuan istimewa, guna mendukung pengembangan potensi dan kecerdasan mereka.⁴²

Berdasarkan uraian tersebut, program kelas unggulan dapat dipahami sebagai suatu program pendidikan yang diselenggarakan secara khusus bagi para siswa yang terlihat memiliki kemampuan akademik, bakat, dan kecerdasan di atas rata-rata. Program ini didukung oleh penerapan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan serta fasilitas pembelajaran yang memadai.

3. Tujuan Program Kelas Unggulan

Pengelompokan pada peserta didik di dalam kelas unggulan bertujuan untuk menciptakan kondisi yang seragam di dalam kelas, sehingga mempermudah pemberian layanan pendidikan.⁴³ Dengan

⁴¹ Agus Supriyono, "Penyelenggaraan Kelas Unggulan di SMA Negeri 2 Ngawi," Thesis, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2009).

⁴² Farida Hanum, "Membangun Citra Madrasah Melalui Program Kelas Unggulan di MTsN 2 Bandar Lampung," *Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*, Vol.14, No.3, Desember 2016. hlm 408.

⁴³ Ali Imron, "*Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah*," (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011). hlm 97.

kondisi ini, proses pembinaan peserta didik dapat dioptimalkan untuk dapat membantu mereka dalam mengembangkan sebuah kecerdasan, kemampuan, keterampilan, dan potensi yang dimiliki.

Program kelas unggulan pada suatu lembaga pendidikan diselenggarakan sebagai Upaya meningkatkan mutu pendidikan secara komprehensif. Melalui program, para siswa diharapkan mampu mengembangkan kemampuan dan prestasi yang unggul sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan. Selain itu, program kelas unggulan juga menjadi sarana untuk mengoptimalkan potensi lembaga, baik dalam aspek sumber daya manusia maupun fasilitas pembelajaran, sehingga dapat mendukung peningkatan kualitas pendidikan secara berkelanjutan.⁴⁴

Selain itu, pengelompokan peserta didik dalam program kelas unggulan bertujuan untuk membentuk pribadi yang berilmu, berakhlak, serta memiliki keimanan dan ketakwaan yang kuat. Program ini juga dirancang untuk memberikan layanan pendidikan yang sesuai bagi peserta didik dengan kemampuan dan bakat istimewa yakni agar potensinya dapat berkembang secara optimal. Program kelas unggulan menjadi bentuk apresiasi terhadap para peserta didik berprestasi serta mempersiapkan lulusan yang unggul dalam aspek akademik, karakter, serta keterampilan mereka sesuai dengan tahap perkembangannya.⁴⁵

⁴⁴ Mubarat Husni, dkk., "Implementasi Program Pendidikan Akselerasi dan Unggulan di Perguruan Al-Azhar Medan," *Jurnal Edu Religia* Vol.3, No.1, Januari-Maret 2019. hlm 9.

⁴⁵ Ibid. hlm 8-9.

Dari tujuan yang dipaparkan, dapat dipahami bahwa program kelas unggulan diselenggarakan untuk mewujudkan peningkatan mutu pendidikan secara optimal. Program ini tidak hanya diarahkan pada pengembangan potensi dan kemampuan peserta didik, tetapi juga bertujuan meningkatkan kompetensi pendidik serta memperkuat mutu di dalam lembaga pendidikan agar mampu mencapai tingkat kualitas yang lebih unggul dan kompetitif.

4. Dasar Penyelenggaraan Program Kelas Unggulan

a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pada pasal sebagai berikut:

- 1) Pasal 5 ayat 4, yakni berbunyi “Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus”.⁴⁶
- 2) Pasal 12 ayat 1 poin b, yaitu berbunyi “Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan yakni berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya”.⁴⁷
- 3) Pasal 32 ayat 1, yang berbunyi “Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran yakni karena kelainan fisik, emosional,

⁴⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5. Ayat (4).

⁴⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 12. Ayat (1).

mental, sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa”.⁴⁸

- b. Peraturan Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 34, 2006 yaitu pembinaan prestasi bagi pelajar yang memiliki kecerdasan atau bakat istimewa yang unggul bertujuan untuk mengembangkan sebuah potensi mereka secara optimal.⁴⁹
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23, 2002 yaitu tentang perlindungan anak pasal 52, menegaskan bahwa anak yang memiliki sebuah keunggulan berhak mendapatkan kesempatan serta akses pendidikan khusus.⁵⁰

5. Karakteristik Program Kelas Unggulan

Berdasarkan pedoman penyelenggaraan pada program kelas unggulan dari Departemen Pendidikan Nasional yang dikutip kembali oleh Suhartono dan Ngadirun, kelas unggulan memiliki sejumlah karakteristik, di antaranya:

- a. Seleksi ketat peserta didik peserta didik yang diterima melalui proses seleksi yang ketat dengan kriteria yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Tenaga pendidik yang kompeten, guru dan tenaga pendidik memiliki keunggulan dalam penguasaan materi, metode pengajaran, serta komitmen tinggi dalam menjalankan tugas.

⁴⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 32. Ayat (1).

⁴⁹ Peraturan Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 34 Tahun 2006, Pembinaan Prestasi Peserta Didik Yang Memiliki Potensi Kecerdasan Dana Tau Bakat Istimewa.

⁵⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Perlindungan Anak, Pasal 52.

- c. Waktu belajar yang lebih panjang, durasi belajar lebih panjang dibandingkan sekolah atau madrasah biasa, serta dilengkapi dengan fasilitas asrama yang memadai.
- d. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan standar yang tinggi, di mana kegiatan belajar mengajar dirancang secara bermutu dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada peserta didik, pihak lembaga, maupun masyarakat.
- e. Tersedia program tambahan di luar kurikulum inti, seperti kegiatan pengayaan dan pengembangan, pembelajaran remedial, layanan bimbingan dan konseling yang optimal, pembinaan kreativitas serta kedisiplinan, berbagai kegiatan ekstrakurikuler, hingga sistem asrama sebagai pendukung pembinaan peserta didik.⁵¹

Dengan karakteristik tersebut, maka program kelas unggulan dirancang untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang optimal bagi pengembangan potensi peserta didik.

D. Mutu Pendidikan

Mutu yaitu merupakan proses yang tersusun secara sistematis untuk meningkatkan kualitas hasil yang dicapai. Menurut Stephan Uselac, mutu tidak hanya berfokus pada produk dan layanan, tetapi juga meliputi proses, lingkungan, serta sumber daya manusia yang terlibat. Oleh karena itu, mutu dapat didefinisikan sebagai kondisi yang

⁵¹ Suhartono dan Ngadirun, *“Penyelenggaraan Program Kelas-Kelas Unggulan di Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo,”* (Semarang: Universitas Terbuka, 2003). hlm 9-10.

melibatkan produk, layanan, proses, lingkungan, dan manusia dalam rangka meningkatkan hasil guna memenuhi kebutuhan pelanggan.⁵²

Dalam kaitannya dengan pendidikan, mutu memiliki korelasi yang penting. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Dzaujak Ahmad, mutu dalam pendidikan dapat diartikan sebagai kemampuan lembaga pendidikan dalam mengelola berbagai unsur pendidikan secara efektif dan efisien yang menghasilkan peningkatan kualitas serta memberikan nilai tambah yang sesuai dengan standar dan ketentuan yang telah ditetapkan.⁵³ Model manajemen mutu berkembang dari upaya yang terus-menerus untuk menjelaskan dan menerapkan prinsip-prinsip peningkatan mutu pada berbagai bidang, termasuk di sektor pendidikan. Hal ini didorong oleh kebutuhan manusia untuk memperbaiki sistem pengukuran dan penerapan mutu di tingkat yang lebih abstrak.

Menurut Uhar Saputra, manajemen mutu dapat didefinisikan secara sederhana sebagai aktivitas manajemen yang berfokus pada pengelolaan mutu. Sementara itu, manajemen kualitas mencakup kegiatan yang melibatkan seluruh fungsi manajemen untuk menentukan kebijakan, tujuan, dan tanggung jawab terkait mutu, serta mengimplementasikannya melalui berbagai alat manajemen, seperti perencanaan, pengendalian, penjaminan, dan peningkatan kualitas.⁵⁴ Manajemen mutu terpadu (*Total Quality Management*) sebagaimana

⁵² F. Tjiptono and A. Diana, *Total Quality Management (TOM) Edisi Revisi*. (Yogyakarta: Andi Offset, 2003). hlm 3.

⁵³ Draujak Ahmad, *Penunjuk Peningkatan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar*. (Jakarta: Depdikbud, 1996). hlm 8.

⁵⁴ Uhar Suharsaputra, *Administrasi Pendidikan*. (Bandung: Refika Aditama, 2010). hlm 233.

dijelaskan Santoso, suatu sistem pengelolaan yang menempatkan mutu sebagai fokus utama dan strategi organisasi dengan orientasi pada kepuasan pelanggan. Penerapannya melibatkan semua elemen dalam organisasi atau lembaga untuk bersama mencapai tujuan tersebut.⁵⁵

Berdasarkan berbagai pendapat ahli mengenai manajemen mutu pendidikan, Edward Sallis menyatakan bahwa manajemen sebuah mutu dalam pendidikan merupakan sebuah filosofi yang menekankan pada perbaikan secara berkelanjutan. Filosofi ini juga menyediakan berbagai perangkat praktis bagi lembaga pendidikan untuk memenuhi kebutuhan, harapan, dan keinginan pelanggan, baik untuk saat ini maupun di masa yang akan datang.⁵⁶ Menurut Fandy Tjiptono dan Anastasia Diana, manajemen mutu merupakan suatu pendekatan yang berfokus pada peningkatan kualitas melalui perbaikan secara terus-menerus terhadap sebuah jasa, sumber daya manusia, produk, serta lingkungan.⁵⁷ Dengan demikian, manajemen sebuah mutu di dalam pendidikan melibatkan seluruh fungsi organisasi madrasah ke dalam sebuah filosofi holistik yang berlandaskan pada konsep mutu, kerja sama tim, produktivitas, serta pencapaian kepuasan pada pelanggan.

Meskipun terdapat berbagai definisi, secara umum manajemen mutu terpadu berpusat pada peningkatan terus-menerus untuk yaitu memastikan kepuasan pelanggan. Sejalan dengan itu, Hensler dan

⁵⁵ F. Tjiptono and A. Diana, *Total Quality Management (TOM) Edisi Revisi*. (Yogyakarta: Andi Offset, 2003). hlm 4.

⁵⁶ Sallis Edward, *Total Quality Management in Edecation: Manajemen Mutu Pendidikan* (Yogyakarta: Irchisod, 2006). hlm 73.

⁵⁷ F. Tjiptono and A. Diana, *Total Quality Management (TOM) Edisi Revisi*. (Yogyakarta: Andi Offset, 2003). hlm 59.

Brunell sebagaimana dikutip oleh Scheuing dan Christopher melalui Siswanto, menyebutkan prinsip utama dalam manajemen mutu, yaitu: (1) Fokus pada kepuasan pada pelanggan, (2) Menghormati setiap individu, (3) Pengelolaan yakni berbasis data dan fakta, (4) Melakukan perbaikan secara berkelanjutan.⁵⁸

Berdasarkan uraian dari pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa mutu merupakan suatu proses yang terstruktur untuk meningkatkan kualitas hasil dengan melibatkan produk, layanan, proses, lingkungan, serta sumber daya manusia guna memenuhi kebutuhan pelanggan. Dalam bidang pendidikan, mutu berkaitan dengan kemampuan lembaga dalam mengelola seluruh sebuah komponen secara efektif serta efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah sesuai standar yang telah ditetapkan. Manajemen mutu pendidikan sendiri menitikberatkan pada pengelolaan kualitas melalui perencanaan, pengendalian, penjaminan, serta peningkatan mutu secara berkelanjutan. Secara umum, konsep mutu dalam pendidikan menekankan pentingnya perbaikan terus-menerus, kerja sama tim, pengambilan keputusan berbasis data, penghargaan terhadap individu, serta orientasi pada kepuasan pengguna layanan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

⁵⁸ Siswanto, *Pengantar Manajemen*. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009). hlm 196-197.